

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PENGGUJI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Permasalahan dan Rumusan	1
1.2. Tujuan Penelitian	9
1.3. Manfaat Penelitian	9
1.4. Tinjauan Pustaka	10
1.4.1. Pendaftaran Tanah	10
1.4.2. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)	13
1.4.3. Pajak Penghasilan (PPh)	14
1.4.4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	15
1.5. Metode Penelitian	17
1.5.1. Tipe Penelitian	17

1.5.2. Pendekatan Masalah	17
1.5.3. Sumber Bahan Hukum	19
1.5.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	20
1.5.5. Analisis Bahan Hukum	20
1.6. Sistematika Penulisan	21
BAB II : KARAKTERISTIK PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DALAM PENDAFTARAN TANAH	22
2.1. Pendaftaran Tanah Secara Umum	22
2.1.1. Pendaftaran Tanah dalam Undang-Undang Pokok Agraria	22
2.1.2. Pendaftaran Tanah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997	24
2.1.3. Pendaftaran Tanah dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997	29
2.2. Karakteristik Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Bila Dibandingkan dengan Pendaftaran Tanah Secara Sporadik dan Pemberian Hak atas Tanah Negara	32
2.2.1. Pendaftaran Tanah secara Sistematis	33
2.2.2. Pendaftaran Tanah secara Sporadik	46
2.2.3. Pemberian Hak atas Tanah Negara	52
BAB III : DASAR PENGENAAN BESARNYA PAJAK PENGHASILAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DALAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP	73

3.1. Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap	73
3.1.1. Pajak Penghasilan	73
3.1.2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	81
3.2. Regulasi Pajak Penghasilan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan pada Pendaftaran Tanah secara Umum dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap	84
BAB IV : PENUTUP	91
4.1. Kesimpulan	91
4.2. Saran	92
DAFTAR BACAAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2. Karakteristik pembeda pendaftaran tanah sistematis (dalam hal ini PTSL), Pendaftaran tanah sporadik, dan pemberian hak atas tanah negara 71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1.1. Rumus Perhitungan PPh Final	80
Gambar 3.1.2. Rumus Perhitungan BPHTB	84
Gambar 3.2.1. Peraturan PPh Final	87
Gambar 3.2.2. Peraturan BPHTB	90